

**PENGARUH DISPARITAS PENDAPATAN, JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 1984-2009****Indra Rukmana**✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Economic Growth

Income Disparities

Population

Inflation

Abstrak

Menurut tipologi daerah, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan yang baik dapat tercapai bila pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series, yaitu data dari tahun 1984-2009. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan Bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi semi log linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian berdasarkan uji F-statistik menunjukkan bahwa secara bersama-sama disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji t-statistik disparitas pendapatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Saran yang berkaitan dari hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional tanpa memperbesar ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Abstract

According to the typology of the region, Central Java Province is a province that has a growth rate below the average national economic growth. Good development can be achieved if high economic growth followed by a distribution of income or development outcomes. The purpose of this study is to determine how the factor income disparities, population and inflation affect economic growth in Central Java. The type of data used are secondary data from time series data, namely data from the years 1984-2009. Data sourced from the Central Bureau of Statistics and Bank of Central Java, Indonesia. The analysis tools are semi-log regression analysis with multiple linear least squares method or the Ordinary Least Square (OLS). The study is based on the F-test statistics show that together disparities of income, population and inflation have a significant effect on economic growth in Central Java. Based on the t-test statistical disparities in income and population have a positive and significant impact on economic growth in Central Java. Inflation has no significant effect to economic growth in Central Java. Suggestions relating to the results of this research is the Government of Central Java province is expected to increase regional economic growth without increasing income inequality and improving the quality and productivity of human resources and creating jobs.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C7, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

E-mail: indra_rukmana@gmail.com

ISSN 2252-6560

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Seringkali pembangunan di wilayah yang lebih kecil mampu memberikan hasil yang mendukung pembangunan di wilayah yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih kecil, pembangunan dilakukan di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten atau kota (Widodo, 2006:6).

Untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara tepat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah biasanya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat ditunjukkan oleh kenaikan GDP atau PDRB.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses tersebut mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Kuncoro, 2004 : 127).

Pada tahun 2005-2009 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir nilainya sebesar 5,22 % dan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,39 %. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih lamban, karena laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di bawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2005-2009 memiliki nilai rata-rata PDRB perkapita sebesar Rp 4.726.600,00, cukup jauh bila dibandingkan dengan nilai rata-rata PDRB per kapita nasional sebesar Rp 8.591.020,00.

Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto per kapita

sebagai sumbu horizontal (Kuncoro, 2004 : 130).

Daerah dalam hal ini provinsi yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan sebagai berikut: (1). Provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh yaitu provinsi dengan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional; (2). Provinsi maju tapi tertekan yaitu provinsi dengan PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional; (3). Provinsi berkembang cepat yaitu provinsi dengan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional; (4). Provinsi tertinggal yaitu provinsi dengan PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita nasional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Jawa Tengah termasuk dalam kriteria provinsi relatif tertinggal karena nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya di bawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita rata-rata nasional.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerataan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan pemerataan pusat dan daerah seperti yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Maka pemerintah pusat memberikan otonomi pemerintah daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Untuk keperluan tersebut diperlukan perencanaan yang lebih baik dan matang dengan menggali sumber daya yang ada. Potensi kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah perlu dipelajari lebih dalam agar dapat dikembangkan guna mendukung pembangunan daerah khususnya bagi Jawa Tengah.

Disparitas pendapatan adalah adanya per-

bedaan atau kesenjangan pembagian pendapatan atau balas jasa dari faktor-faktor produksi antar individu maupun antar daerah karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Analisis disparitas dianggap penting karena dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar pembangunan yang telah dicapai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, yaitu dengan mengetahui tingkat distribusi pendapatan yang telah terjadi. Selain itu dengan analisis ini dapat mengetahui perbandingan tingkat pertumbuhan antar suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ada upaya dari pemerintah untuk mengembangkan daerah yang pendapatannya masih rendah (Muh-sin, 2007:208).

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakmerataan antar daerah ini, antara lain : konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi geografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah (Tambunan, 2003:177).

Mengingat bahwa potensi-potensi yang dimiliki setiap kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tidak sama, wujud dari pemerataan pendapatan pembangunan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana disparitas pendapatan yang terjadi. Disparitas yang dimaksud adalah tingkat ketidakmerataan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang digunakan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui proses pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercermin kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai di Jawa Tengah selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk karena pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk. Jumlah penduduk perlu diperhatikan karena selain sebagai subjek, penduduk juga merupakan objek pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kependudukan akan mempengaruhi proses pembangunan serta tujuan yang hendak dicapai.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang di-

gunakan walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor. Tetapi para ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan (Sukirno, 2010 : 433).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan mendapatkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif (Sukirno, 2010 : 433).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain faktor pemerataan distribusi pendapatan dan jumlah penduduk adalah faktor inflasi. Banyak kajian membahas inflasi tidak hanya cakupan nasional, tetapi regional maupun internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan ekonomi, menurunkan investasi, menghambat ekspor dan maupun dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sisi kesejahteraan, inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat, terutama bagi pekerja-pekerja yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.

Peningkatan inflasi menyebabkan penuru-

nan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mulai munculnya inflasi tinggi pada tahun 1997 di Indonesia menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dari 7,95% tahun 1996 menjadi 3,12% di tahun 1997 dan inflasi di Jawa Tengah meningkat dari 5,88 % tahun 1996 menjadi 10,13 % ditahun 1997. Kondisi terparah terjadi pada tahun 1998 dimana Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -13,43% dan inflasi mencapai tingkat 70,56 % (Andrianus, 2006:173). Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : (1). Apakah ada pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah; (2). Apakah ada pengaruh disparitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?; (3). Apakah ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?; (4). Apakah ada pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah dan data yang dipergunakan adalah sekunder berdasarkan data deret berkala (*time series*) dari tahun 1984-2009 di Jawa Tengah yang diperoleh dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terikat (*dependent variabel*) maka penelitian ini menggunakan model regresi semi log linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Pengolahan data menggunakan program EViews 5. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2010:71).

Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Jika terjadi Pertumbuhan yang positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, hal ini menunjukkan adanya penurunan

perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami Perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai -13,45%. Kemudian tahun-tahun berikutnya perekonomian Jawa Tengah mulai membaik lagi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1984	53418721,77	6.15
1985	57879652,08	8.35
1986	61384335,65	6.06
1987	64995101,55	5.88
1988	69123314,29	6.35
1989	73588392,26	6.46
1990	78737956,23	7.00
1991	84374068,47	7.16
1992	90651628,41	7.44
1993	96178400,64	6.10
1994	103430848,46	7.54
1995	111545219,71	7.85
1996	120414449,91	7.95
1997	124158837,65	3.11
1998	107478506,84	-13.43
1999	111161113,52	3.43
2000	115168018,86	3.60
2001	118816400,29	3.17
2002	123038541,13	3.55
2003	129166462,45	4.98
2004	135789035,62	5.13
2005	143051872,31	5.35
2006	150681441,24	5.33
2007	159083138,77	5.58
2008	167023582,95	4.99
2009	175188025,56	4.89

Sumber: BPS Jawa Tengah diolah

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Selama tahun pengamatan pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai 4,99% dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada tahun 1985 sebesar 8,35% dan paling rendah pada tahun 1998 sebesar -13,43%. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan sumbangan sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran sebagai dampak dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 2007.

Sementara itu, besarnya PDRB per kapita menggambarkan kondisi yang lebih nyata mengenai kondisi perekonomian di suatu wilayah, sebab dalam perhitungannya telah melibatkan jumlah penduduk, sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1984-2009 yang mengalami peningkatan bisa jadi merupakan indikasi dari kondisi perekonomian yang mulai membaik. Namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi tersebut belum bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi tanpa disertai pola pembagian pendapatan yang merata berakibat terjadinya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Besarnya kondisi disparitas pendapatan tersebut dapat dihitung dengan Indeks Williamson. Berdasarkan Indeks Williamson dapat diketahui bahwa kondisi disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda. Nilai Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.

Dengan perhitungan indeks ketimpangan Williamson dapat diketahui ketimpangan pendapatan di Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1984-2009 berkisar 0,065-0,090. Dengan besarnya rata-rata ketimpangan pendapatan selama tahun 1984-2009 yakni 0.075. Sehingga tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan pada tingkat yang rendah. Angka ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah rendah mengingat pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Adapun jumlah penduduk merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan. Selain sebagai subjek, penduduk juga menjadi objek dalam pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah penduduk ditunjukkan dengan angka pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1984-2009 mengalami peningkatan.

Berdasarkan data pada Tabel 3, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009

Tahun	Indeks Williamson
1984	0.069
1985	0.070
1986	0.071
1987	0.066
1988	0.065
1989	0.066
1990	0.067
1991	0.074
1992	0.076
1993	0.080
1994	0.082
1995	0.083
1996	0.080
1997	0.081
1998	0.076
1999	0.076
2000	0.077
2001	0.077
2002	0.077
2003	0.079
2004	0.079
2005	0.077
2006	0.078
2007	0.078
2008	0.077
2009	0.090

Sumber : BPS Jawa Tengah diolah

dari tahun 1984-2009 sebesar 1,16%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 1987 sebesar 4,89%, ini disebabkan karena tingkat kelahiran di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1987 meningkat. Pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 1997 sebesar 0,50%, ini disebabkan karena tingkat kelahiran di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1997 menurun. Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah harus tetap diperhatikan agar tidak terjadi ledakan penduduk.

Sementara Inflasi merupakan suatu kenaikan dari harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Laju inflasi yang tinggi memiliki efek negatif bagi perekonomian sebab inflasi yang tinggi akan mengganggu mobilisasi dana domestik dan tingkat investasi. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk jika terjadi inflasi yang tinggi yang tidak dikendalikan, sebab akan mengurangi investasi produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor barang sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. secara umum sektor

Tabel 3. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
1984	25564785	1.00
1985	25843808	1.09
1986	26237260	1.52
1987	27520963	4.89
1988	27846126	1.18
1989	28090715	0.88
1990	28581354	1.75
1991	28967006	1.35
1992	29213666	0.85
1993	29402371	0.65
1994	29659272	0.87
1995	30001115	1.15
1996	30566461	1.88
1997	30717933	0.50
1998	30963641	0.80
1999	31222223	0.84
2000	31772426	1.76
2001	31972602	0.63
2002	32171463	0.62
2003	32466421	0.92
2004	32737089	0.83
2005	33082676	1.06
2006	33281142	0.60
2007	33626091	1.04
2008	33948186	0.96
2009	34127351	0.53

Sumber : BPS Jawa Tengah diolah

rumah tangga dan perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika terjadi inflasi tinggi dan tidak dapat diprediksikan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 1984 angka inflasi sebesar 6,63%, sampai pada tahun 1987 sebesar 9.02%. Pada tahun 1988 inflasi turun cukup tajam yaitu sebesar 4,44% namun kembali naik pada tahun berikutnya. Meski masih fluktuatif hingga pada tahun 1998 mencapai angka tertinggi sebesar 70,56%. hal ini dipicu oleh adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga berdampak pada lesunya iklim ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 4. Perkembangan Inflasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009 (%)

Tahun	Inflasi
1984	6.63
1985	3.94
1986	8.18
1987	9.02
1988	4.44
1989	7.12
1990	8.27
1991	6.35
1992	5.21
1993	9.77
1994	9.23
1995	8.27
1996	5.89
1997	10.13
1998	70.56
1999	1.02
2000	8.62
2001	13.15
2002	10.56
2003	3.14
2004	5.67
2005	15.82
2006	7.11
2007	6.27
2008	9.47
2009	3.62

Sumber : BPS Jawa Tengah diolah

Dari hasil regresi pada tabel 4 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\ln PDRB = 14.16252 + 11.47031 DP_t + 1.13E-07 JP_t - 0.000331 INF_t + \mu_t$$

Apabila disparitas pendapatan, jumlah penduduk, dan inflasi sama dengan nol, maka PDRB Jawa tengah sebesar 14.16% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (ceteris paribus).

Uji Koefisien Determinan R², berdasarkan Tabel 7 yang merupakan hasil estimasi model menggunakan program EViews 5 diperoleh R² sebesar 0,9849, artinya variabel PDRB sebesar 98,49% dipengaruhi oleh variabel disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi dan sisanya sebesar 1,51% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji F-Statistik, berdasarkan hasil estimasi terhadap model dari Tabel 7, menunjukkan nilai F-statistik sebesar 479.9527 dan probabilitasnya sebesar 0.000000. Sehingga dapat diketahui

Tabel 5. Hasil estimasi regresi semi log linier berganda

Variabel	Koefisien	Standar error	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	14.16252	0.119784	118.2339	0.0000
Disparitas Pendapatan (DP)	11.47031	2.066081	5.551721	0.0000
Jumlah Penduduk (JP)	1.13E-07	4.86E-09	23.18873	0.0000
Inflasi (INF)	-0.000331	0.000698	-0.474609	0.6397
	R-squared	= 0.984951		
	Adjusted R-squared	= 0.982898		
	F-statistik	= 479.9527		
	Probabilitas (F-statistik)	= 0.000000		
	Durbin Watson stat	= 0.925924		

bahwa F-statistik sebesar $479.9527 > F$ tabel (α , k-1, n-k) 3.05. Probabilitas F-statistik $0.000000 < \alpha = 5\%$. Kesimpulannya adalah tolak H_0 dan terima H_a yang berarti bahwa variabel disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009.

Uji t-Statistik

Disparitas Pendapatan

Berdasarkan hasil estimasi terhadap model dari Tabel 7, diperoleh nilai probabilitas disparitas pendapatan sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$. t hitung $5.551721 > t$ tabel (α , n-k) 1.717. Kesimpulannya adalah tolak H_0 dan terima H_a yang berarti bahwa variabel disparitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009.

Jumlah penduduk, berdasarkan hasil estimasi terhadap model dari Tabel 4.5, diperoleh nilai probabilitas jumlah penduduk sebesar $0.0000 < \alpha = 5\%$. t hitung $23.18873 > t$ tabel (α , n-k) 1.717. Kesimpulannya adalah tolak H_0 dan terima H_a yang berarti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009.

Inflasi, berdasarkan hasil estimasi terhadap model dari Tabel 4.5, diperoleh nilai probabilitas inflasi sebesar $0.6397 > \alpha = 5\%$. t hitung $-0.474609 < t$ tabel (α , n-k) 1.717. Kesimpulannya adalah terima H_0 dan tolak H_a yang berarti bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009.

Hasil Uji Asumsi Klasik. Multikolinearitas

Hasil R^2 regresi awal : $\text{LnPDRB} = \text{DP} + \text{JP} + \text{INF} = 0.984951$. Berdasarkan hasil estimasi terhadap model dapat diketahui bahwa : R^2 regresi awal = $0.984951 >$, $R^2_1 \text{ DP} = \text{JP} + \text{INF} = 0.479577$, R^2 regresi awal = $0.984951 >$, $R^2_2 \text{ JP} = \text{DP} + \text{INF} = 0.482923$, R^2 regresi awal = $0.984951 >$, $R^2_3 \text{ INF} = \text{DP} + \text{JP} = 0.009889$

Kesimpulannya bahwa model yang digunakan bebas dari masalah multikolienaritas.

Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil uji White Heteroskedasticity Test (no cross terms)

F-statistic	0.815663
Probability	0.571068
Obs*R-squared	5.325333
Probability	0.502814

Sumber : EViews 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar $0.181325 > \alpha = 0,05$. Kesimpulannya bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	5.694345
Probability	0.011030
Obs*R-squared	9.433524
Probability	0.008944

Sumber : EViews 5 diolah

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat diketahui nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar $0.008944 < \alpha = 0,05$. Kesimpulannya bahwa model yang digunakan mengalami autokorelasi.

Masalah autokorelasi dapat diobati dengan mendifferensiasikan estimasi pada tingkat pertama. Dengan menggunakan rumus estimasi : $d(\log(\text{pdrb})) \text{ c } d(\text{dp}) \text{ d}(\text{jp}) \text{ in } \text{AR}(1)$

Hasil estimasi diatas selanjutnya di uji dengan menggunakan uji *Breunch and Godfrey Serial Correlation LM-Test*.

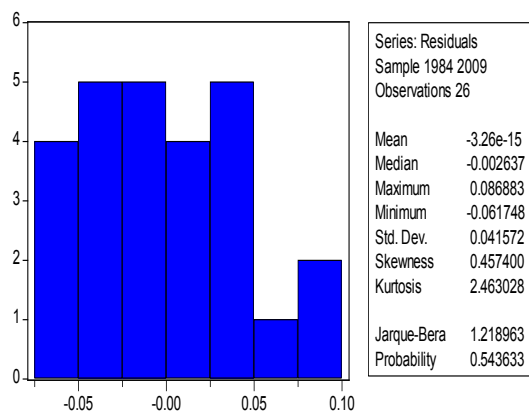
Tabel 10. Hasil uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (1st difference)

F-statistic	1.903431
Probability	0.179498
Obs*R-squared	4.391085
Probability	0.111298

Sumber : EViews 5 diolah

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat diketahui nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar $0.111298 > \alpha = 0,05$. Kesimpulannya bahwa model yang digunakan tidak mengalami autokorelasi.

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil uji Jarque-Bera Test
Sumber: EViews 5 diolah

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat diketahui nilai probabilitas J-B sebesar $0.543633 > \alpha = 0,05$. Kesimpulannya bahwa model yang digunakan berdistribusi normal.

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah selama dua puluh enam tahun yaitu dari tahun 1984-2009 adalah disparitas pendapatan, jumlah penduduk, dan inflasi. Pengaruh dari variabel-variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 1984-2009 terjadi fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang sedikit demi sedikit mulai meningkat mencerminkan kondisi perekonomian mampu menggerakkan faktor-faktor produksi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi penting diperhatikan karena sering digunakan sebagai bahan pertimbangan awal mengenai rencana atau kebijakan menyangkut kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Kedua, disparitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila kenaikan disparitas pendapatan sebesar 1 % maka PDRB

Jawa Tengah akan naik sebesar 11.47% dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*). Semakin tinggi konsentrasi pendapatan di satu kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota di sekitarnya menyebabkan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Karvis (1960) dan Oshima (1962), menyatakan bahwa ekonomi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata pembangunannya mampu tumbuh lebih cepat dibanding dengan pembangunan dengan pemerataan pendapatan yang relatif baik. Sesuai dengan hipotesis Kuznet bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan, semakin baik distribusi pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa tingginya pendapatan suatu daerah akan mendorong daerah lainnya untuk lebih mengembangkan dan mengolah potensi-potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian yang lebih maju agar dapat bersaing dengan daerah lain.

Ketiga, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 % maka PDRB Jawa Tengah akan naik sebesar 1.13 % dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*). Semakin meningkatnya jumlah penduduknya semakin meningkat juga tingkat konsumsi, semakin meningkatnya tingkat konsumsi semakin meningkat juga tingkat produksi yang dihasilkan yang dapat meningkatkan PDRB. Kaum Nasionalis beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk akan menstimuli pembangunan ekonomi. Ide dasarnya adalah dengan penduduk yang banyak akan berakibat pada produktifitas yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi pula. Para pengikut Keynes tidak melihat tambahan penduduk sekedar sebagai pertambahan penduduk saja, tetapi juga melihat adanya suatu kenaikan dalam daya beli. Disamping itu mereka juga menganggap adanya kemajuan berupa meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja akan selalu mengiringi kenaikan jumlah penduduk. Disamping itu, Pertumbuhan penduduk juga mendorong adanya perluasan investasi, karena adanya kebutuhan permintaan yang semakin besar dan juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum.

Keempat, Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah Daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan inflasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Jawa Tengah. Salah satu alasannya bahwa tinggi ren-

dahnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat dengan daya beli masyarakat yang tinggi yang suka dengan produk yang kompetitif dan daya saing produk yang tinggi. Teori yang mendukung yaitu teori salah seorang Profesor dari universitas Harvard, David Laibson dengan dorongan gravitasi instan. Beliau menyatakan bahwa keputusan konsumsi tidak dibuat sepenuhnya rasional (konsumsi tidak dipengaruhi oleh pendapatan). Bagian baru yang memasukkan faktor psikologis ke dalam kegiatan ekonomi disebut ekonomi perilaku. David Laibson mencatat banyak konsumen menganggap diri mereka pembuat keputusan tak sempurna.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Berdasarkan hasil penelitian kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 26 tahun (1984-2009) terjadi fluktuasi, rata-rata pertumbuhan sebesar 4,99%. Disparitas Pendapatan dihitung dengan menggunakan indeks Williamson, rata-rata disparitas pendapatan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1984-2009 sebesar 0,075. Angka ini menunjukkan bahwa disparitas pendapatan masih rendah yang artinya tidak terdapat perbedaan pendapatan yang terlalu jauh. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1984-2009 sebesar 1,16%; (2). Berdasarkan pengujian secara simultan dengan menggunakan uji-F menunjukkan bahwa disparitas pendapatan, jumlah penduduk dan inflasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan uji-t menunjukkan Disparitas pendapatan dan jumlah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain : (a). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan eko-

nomi regional tanpa memperbesar ketimpangan pendapatan. Disparitas pendapatan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi dan kestabilan politik. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu lebih diefektifkannya program PNPM mandiri dan dalam perencanaan pembangunan agar diarahkan / diprioritaskan bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan tidak melupakan daerah yang lain; (b). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang positif, sebaiknya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja serta menciptakan lapangan pekerjaan. Diharapkan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dapat membuka lapangan usaha yang bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja diberbagai sektor; (c). Meskipun variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi diharapkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tetap mengontrol laju inflasi agar tidak terjadi Hiperinflasi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Karena jika inflasi terus menerus dibiarkan meningkat akan berdampak negatif terhadap perekonomian di Jawa tengah.

Daftar Pustaka

- Gujarati, Damodar. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika : Basic Economic*. Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga
- Muhsin. 2007. Disparitas Pendapatan : Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 16 No. 2. September 2007
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN